

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

Haeruddin*¹, Lina Mariana²

^{1,2}Prodi Administrasi Pemerintahan/Politeknik Informatika Nasional

e-mail: *haeruddindml@gmail.com, linamariana90@yahoo.co.id

Abstrak

Badan usaha milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Takalar dalam hal praktek sistem akuntansi masih sangat sederhana dan belum dapat menyajikan pelaporan keuangan yang tepat sehingga akuntabilitas keuangan dipandang masih sangat lemah. Adapun hasil penelitian adalah 1) Pengelolaan keuangan Bumdes menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diperkenankan, 2) Penyajian laporan keuangan belum tepat yang kemudian berdampak pada kinerja dan posisi keuangan entitas. 3) informasi keuangan Bumdes tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi (a) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel, (b) merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (d) berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh organisasi, (e) memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Kata kunci : Sistem Akuntansi, Akuntabilitas Keuangan, BUMDes

Abstract

Village-owned enterprises (BUM Desa) in Takalar District, in terms of practice, the accounting system is still very simple and has not been able to present proper financial reporting so that financial accountability is still considered very weak. The results of the research are 1) Bumdes financial management uses a simple bookkeeping system and does not reflect systematic and accurate financial reporting based on permitted Financial Accounting Standards, 2) The presentation of financial statements is not correct which then has an impact on the performance and financial position of the entity. 3) the financial information of Bumdes is not in accordance with the principles of accountability, including (a) there is a commitment from the leadership and all staff to manage an organization that has an accountable value, (b) is a system that ensures consistent use of resources based on laws and regulations that applies, (c) shows the level of achievement of the goals and objectives that have been set, (d) oriented to the vision, mission, results, and benefits obtained by the organization, (e) upholds the values of honesty, transparency, objectivity and innovation.

Keywords : : Accounting System, Financial Accountability, BUMDes

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei awal BUMDes di Kabupaten Takalar, jumlah BUMDes sebanyak 75 unit dari 76 Desa yang ada di Kabupaten Takalar atau sudah mencapai 99%. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Potensi setiap desa di Kabupaten Takalar, menunjukkan bahwa setiap desa memiliki potensi dibidang pertanian, perikanan, dan industri kecil. Keberadaan BUMDes merupakan solusi meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memanfaatkan produk dari masyarakat untuk dikelola oleh BUMDes sebagai produk unggulan bernilai komersial dan dikelola secara produktif dalam meningkatkan kinerja keuangan BUMDes (Mariana, 2020)

Pemetaan tersebut, diharapkan hadir program yang dapat mendukung peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelolanya. Pengelola BUMDes membutuhkan pengetahuan tentang perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan SDM, investor, pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Beberapa permasalahan BUMDes yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang menjadi perhatian utama sebagai sumber informasi serta menjadi kontrol keuangan agar modal penyertaan dari desa dapat dimanfaatkan atau dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUMDes dan yang paling penting adalah bagaimana BUMDes dapat melaporkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang kemudian dapat memberikan bagi hasil kepada desa sebagai tambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Menurut Pendamping Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dari beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Takalar mengatakan bahwa, sistem akuntansi yang dijalankan masih sederhana, dan belum memberikan laporan keuangan lengkap. Fénomena tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi belum berjalan dengan baik dan akuntabilitas keuangan BUMDes belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya praktek sistem akuntansi pada BUMDes. Hal tersebut terjadi karena: adanya persepsi terhadap urgensi keberhasilan sistem akuntansi bagi BUMDes, terbatasnya pelatihan dan pengetahuan Akuntansi pada pengurus BUMDes, adanya pertimbangan biaya manfaat bagi BUMDes, (4) Ukuran BUMDes.

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, telah banyak melakukan perubahan dari manual dan beralih pada sistem *online* data processing. Salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data, menyimpan data tentang aktivitas transaksi keuangan dan memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkembangan dan kemajuan BUMDes, lembaga membantu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa ini membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang akurat. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mampu memberikan kepuasan bagi pemakainya (*user*) baik pihak eksternal maupun pihak internal. Dengan BUMDes menerapkan sistem informasi akuntansi secara tidak langsung bahwa BUMDes sudah menerapkan prinsip akuntabel, dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2006:18) dalam (Kusuma Yanti & Musmini, 2020) transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Dengan adanya fenomena tersebut, menjadi rumusan masalah yaitu “bagaimana sistem akuntansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes di Kecamatan Galesong Utara?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes di Kecamatan Galesong Utara. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDEs, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat pengguna. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi dan akuntabilitas keuangan BUMDEs di Kecamatan Galesong Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari buku maupun sumber yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, analisis data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan BUMDes

Bumdes merupakan salah unit bisnis yang dibentuk di setiap desa dan menjadi penggerak ekonomi desa yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk kepentingan PAD maka pengurus Bumdes diharapkan dapat memanfaatkan sumber pendanaan berupa penyertaan dari dana desa dan sumber pendanaan dari masyarakat. Sebagai investor mengharapkan penghasilan dari penyertaan modalnya kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tersebut. Pengurus sebagai penggerak badan usaha milik desa (Bumdes) memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan usaha dan modal penyertaan yang bersumber dari desa dan masyarakat agar dipergunakan untuk mengelola bisnis komersil dan memperoleh keuntungan (*profit*). Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memakmurkan pemodal dan mensejahterakan pengelola. Hal ini menjadi sebuah kekuatan dalam memperoleh nilai dan menumbuhkan kepercayaan investor dan kemudian berdampak pada peningkatan asset dan modal Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) yang dapat dilihat pada kinerja keuangan dan posisi keuangan badan usaha.

Laporan keuangan terdiri dari laporan kinerja keuangan atau disebut laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca), merupakan informasi yang diberikan oleh badan usaha kepada stake holder yaitu pemerintah desa, investor, pengurus, dan kepada masyarakat. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. SAK inilah yang kemudian menjadi *plat form* dalam membuat kebijakan akuntansi Bumdes, agar dalam pelaksanaan manajemen usaha Bumdes terutama dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi yang baik.

Bumdes “Mitra Mandiri“ salah satu Bumdes di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar merupakan BUMDEs yang terbaik dari seluruh BUMDEs yang ada di Kabupaten Takalar dijadikan sebagai tempat yang layak untuk pengambilan data. BUMDes tersebut memiliki unit usaha yaitu unit simpan pinjam (USP), jasa foto *copy* dan penjualan ATK, BRI link dan PPOB. Menurut Taufik yang bertindak sebagai pendamping Bumdes di Kabupaten Takalar memberikan informasi bahwa, “Bumdes Mitra Mandiri adalah Bumdes yang berkinerja baik di Kabupaten Takalar dan yang terbaik di Kecamatan Galesong Utara. Bumdes Mitra Mandiri dengan unit usaha yang

dipandang dapat memberikan menggerakkan potensi ekonomi di desa dengan menyediakan modal pinjaman kepada masyarakat dalam rangka membantu permodalan usaha mikro milik masyarakat". Lebih lanjut dikatakan bahwa, "sehubungan dengan modal penyertaan dari pemerintah desa, Bumdes Mitra Mandiri telah membukukan laba setiap akhir tahun dan telah menyetor pendapatan asli desa (PAD) ke desa.

BUMDES " MITRA MANDIRI"	
Laporan Laba Rugi	
Per 31 Desember 2019	
Dalam Rupiah (Rp)	
1 Pendapatan	
Jasa simpan pinjam	15.952.500
Foto copy	1.741.000
Penjualan ATK	1.147.427
Jasa PPOB	1.554.575
Jasa lapak	6.485.000
Jasa BRllink	270.000
Jasa bank	722.450
Total pendapatan	27.872.952
2 Biaya operasional	
Transport & insentif pengurus	1.692.000
Biaya administrasi dan umum	2.396.255
Biaya perlengkapan	3.075.800
Biaya transport	200.000
Biaya konsumsi	693.200
Total biaya operasional	8.057.255
Laba bruto	19.815.697
3 Biaya non operasional	
Pajak bank	160.989
administrasi bank	46.500
Total biaya non operasional	207.489
Laba bersih	19.608.208

Gambar 1 Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2019

Dari laporan laba rugi per 31 Desember 2019, menerangkan bahwa jumlah pendapatan operasional sebesar Rp. 27.872.952,- , beban operasional Rp. 8.057.255,- beban non operasional Rp. 207.489,- dengan total laba bersih dalam 1 tahun periode akuntansi sebesar Rp. 19.609.208,-.

BUMDES " MITRA MANDIRI"			
NERACA			
Per 31 Desember 2019			
Dalam Rupiah (Rp)			
1 Aktiva	Rp.	2 Hutang	Rp.
Kas	12.104.309	Tabungan nasabah	2.849.500
Bank	135.396.775	Hutang gaji'	6.655.608
Persediaan barang dagangan	4.221.900	Total hutang	9.505.108
Piutang usipa	167.347.600	3 Modal	
Inventaris kantor	66.083.100	Modal	400.000.000
Inventaris lapak	11.935.900	Laba tahun 2018	2.976.268
Deposito BRllink	17.500.000	Laba tahun 2019	19.608.208
Deposito PPOB	17.500.000		422.584.476
Total Aktiva	432.089.584	Total Hutang + Modal	432.089.584

Gambar 2 Laporan posisi keuangan tahun yang berakhir 2019

Dari laporan posisi keuangan tahun yang berakhir 2019, memperlihatkan posisi keuangan yang terdiri dari total asset Rp. 432.089.584,- total hutang Rp. 9.505.108,- dan total modal sebesar Rp. 422.584.476,- Posisi keuangan tersebut di atas memperlihatkan

posisi keuangan yang sangat likuid. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pengurus Bumdes Mitra Mandiri, mempertegas mengenai pengelolaan keuangan dan usaha yang dilaksanakan dengan menggunakan pembukuan sederhana. Hasil wawancara, 03 Juli 2020) dengan (Rianto Dg. Sese selaku ketua Bumdes Mitra Mandiri mengatakan bahwa:

“BumDes Mitra Mandiri belum memiliki sistem akuntansi. Kami hanya pakai melaksanakan pencatatan. Dalam pembukuan itu dicatat semua uang masuk dan uang yang keluar. Kita disini masih menggunakan pembukuan sederhana yang isinya cuma ada debet dan kredit sama sisa saldo”

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat/merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik sebagai pendamping Bumdes kabupaten Takalar mengatakan :

“tidak ada formulir dibuat sebagai bukti transaksi, seperti formulir bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Cuma nota-nota saja yang diarsipkan lalu dicatat dan dimasukkan ke pembukuan. Makanya biasa ada mi juga nota yang tercecer kalau terlambat di catat di pembukuan”. (Bapak Taufik, Pendamping Bumdes 03 Juli 2020)

Hasil pengamatan terhadap keberadaan formulir sebagai bukti-bukti transaksi, bukti-bukti yang dimaksud tersebut belum diadministrasi dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bumdes. Setiap entitas pelaporan dalam hal ini Bumdes mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yakni: akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

Pelaporan keuangan seharusnya setiap akhir bulan sudah selesai dan bisa di laporkan kepada komisaris Bumdes. Namun pada kenyataannya yang terjadi laporan keuangan hanya bisa dihadirkan setelah akhir tahun. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Salma selaku Bendahara (wawancara, 03 Juli 2020).

“Tidak pernah ada laporan keuangan setiap bulan saya terima. Biasa itu pengurus Bumdes lewat pi akhir tahun baru na serahkan laporannya. Biasa itu satu bulan atau dua bulan setelah akhir tahun.”(Ibu Salma, bendahara Bumdes 20 Juli 2020)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan belum disusun setiap bulan, sehingga dipandang belum menyajikan laporan keuangan yang *update* dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang mengakibatkan terjadinya proses *lapping*. Dan sebaiknya laporan keuangan disusun setiap akhir bulan berjalan agar laporan keuangan setiap tahun dapat dikompilasi menjadi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir entitas.

Hasil Pembahasan

Menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat, harus menjalankan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik dan terstruktur, sesuai prosedur serta memenuhi prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Untuk membuat laporan

keuangan Bumdes, membutuhkan pemahaman prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum yang terdiri dari (1) prinsip entitas ekonomi, (2) prinsip periode akuntansi, (3) prinsip biaya historis, (4) prinsip satuan moneter, (5) prinsip berkesinambungan usaha, (6) prinsip pengungkapan penuh, (7) prinsip pengakuan pendapatan, (8) prinsip mempertemukan, (9) prinsip konsistensi, (10) prinsip materialitas.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terutama yang memiliki wewenang sebagai bendahara yang bertugas mempertanggungjawabkan seluruh aktiva, hutang dan modal yang dimiliki oleh entitas. Sebagai badan usaha diwajibkan setiap akhir tahun melaporkan laporan keuangan kepada komisaris. Laporan keuangan yang diserahkan dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus bumdes adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan pembagian sisa hasil usaha.

Laporan keuangan adalah produk dari siklus akuntansi yang dimulai dari dokumen transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur. Agar proses akuntansi dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan pemahaman dasar akuntansi yang memadai yang didukung oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan informasi laporan keuangan yang telah disajikan oleh bendahara, berdasarkan hasil pengamatan laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Proses pelaporan keuangan pada badan usaha milik desa tersebut, belum terstruktur dengan baik, hal ini dapat dilihat pada penyajian neraca; belum ada pemisahan antara akun aktiva lancar dan aktiva tetap, hutang lancar dan hutang jangka panjang, hal tersebut mencerminkan bahwa Bumdes tersebut belum memiliki sistem akuntansi yang baik dan memadai.

Dari hasil pengamatan peneliti, pengelolaan manajemen keuangan dan akuntansi di Bumdes Mitra Mandiri masih menggunakan pembukuan yang sederhana, berupa catatan-catatan mengenai keuangan masuk dan keluar dan buku hutang piutang.

Sistem akuntansi sebaiknya memenuhi 5 (lima) unsur yaitu : 1) formulir, 2) Jurnal, 3) Buku Besar (*General Ledger*), 4) Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*), dan 5) Laporan. Pada prakteknya, BumDes hanya menggunakan catatan-catatan atau pembukuan sederhana mengenai transaksi pembelian, transaksi penjualan dan transaksi pengeluaran kas. Pengelolaan akuntansi menggunakan buku tidaklah efisien dan apalagi kalau transaksi yang terjadi belum didukung oleh formulir yang menjadi dokumen atau bukti-bukti transaksi.

Dari laporan keuangan yang dilaporkan kepada komisaris Bumdes terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Sementara laporan keuangan yang seharusnya dilaporkan terdiri dari (1) catatan atas laporan keuangan, (2) laba rugi, neraca dan (3) laporan arus kas. Dalam laporan laba rugi Bumdes terdapat keuntungan sebesar Rp. 19.608.200,- jumlah tersebut diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan beban yang dibayar secara tunai, sedangkan beban atas pemakaian aktiva dalam hal ini inventaris belum dihitung beban atau biaya penyusutannya. Peneliti memberikan penyajian yang berbeda pada perhitungan laba rugi setelah memperhitungkan biaya penyusutan dengan laba yang diperoleh Rp. 103.458,- Penyajian laporan keuangan yang tidak akurat berdampak pada perhitungan bagi hasil (hasil usaha), yang kemudian dapat memungkinkan terjadinya kerugian pada Bumdes.

BUMDES " MITRA MANDIRI"		
Laporan Laba Rugi		
Per 31 Desember 2019		
Dalam Rupiah (Rp)		
	Lap. Bendahara	Lap. Peneliti
1 Pendapatan		
Jasa simpan pinjam	15.952.500	15.952.500
Foto copy	1.741.000	1.741.000
Penjualan ATK	1.147.427	1.147.427
Jasa PPOB	1.554.575	1.554.575
Jasa lapak	6.485.000	6.485.000
Jasa BRlink	270.000	270.000
Jasa bank	722.450	722.450
Total pendapatan	27.872.952	27.872.952
2 Biaya operasional		
Transport & insentif pengurus	1.692.000	1.692.000
Biaya administrasi dan umum	2.396.255	2.396.255
Biaya perlengkapan	3.075.800	3.075.800
Biaya transport	200.000	200.000
Biaya konsumsi	693.200	693.200
Biaya penyusutan inventaris	-	19.504.750
Total biaya operasional	8.057.255	27.562.005
Laba bruto	19.815.697	310.947
3 Biaya non operasional		
Pajak bank	160.989	160.989
administrasi bank	46.500	46.500
Total biaya non operasional	207.489	207.489
Laba bersih	19.608.208	103.458

Gambar 4 Laporan Laba Rugi (Bendahara dan Peneliti)

Penyajian laporan laba rugi yang tidak tepat berdampak pada posisi keuangan (Neraca) yang tidak tepat, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada pengurus Bumdes.

BUMDES " MITRA MANDIRI"			
NERACA			
Per 31 Desember 2019			
Dalam Rupiah (Rp)			
	Bendahara		Peneliti
1 Aktiva	Rp.		
Kas	12.104.309		12.104.309
Bank	135.396.775		135.396.775
Persediaan barang dagangan	4.221.900		4.221.900
Piutang usipa	167.347.600		167.347.600
Inventaris kantor	66.083.100		66.083.100
Inventaris lapak	11.935.900		11.935.900
Penyusutan aktiva tetap	-	-	19.504.750
Deposito BRllink	17.500.000		17.500.000
Deposito PPOB	17.500.000		17.500.000
Total Aktiva	432.089.584		412.584.834
2 Hutang	Rp.		
Tabungan nasabah	2.849.500		2.849.500
Hutang gaji'	6.655.608		6.655.608
Total hutang	9.505.108		9.505.108
3 Modal			
Modal	400.000.000		400.000.000
Laba tahun 2018	2.976.268		2.976.268
Laba tahun 2019	19.608.208		103.458
	422.584.476		403.079.726
Total Hutang + Modal	432.089.584		412.584.834

Gambar 5 Neraca Versi Bendahara dan Peneliti

Dilihat dari laporan Bumdes di atas, Bumdes menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca belum sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga dari laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara pada akhir tahun dan diserahkan ke komisaris Bumdes sebagai bahan pertanggung jawaban pengurus belum mencerminkan informasi keuangan yang akurat kepada stake holder. Dari uraian di atas, pengelolaan usaha dan keuangan Bumdes Mitra Mandiri di Kecamatan Galesong Utara, belum memiliki sistem akuntansi dalam menjalankan proses akuntansi keuangan entitas dan belum menjalankan manajemen usaha dan keuangan dengan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, sehingga dimungkinkan terjadi proses *lapping* dalam pengelolaan manajemen usaha dan keuangan yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi Bumdes yang dapat mengganggu kesinambungan usaha Bumdes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan keuangan Bumdes menggunakan sistem pembukuan yang sederhana, dan belum mencerminkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat. Hal tersebut disebabkan oleh karena entitas dalam hal ini Bumdes belum memiliki sistem akuntansi yang dijadikan patron dalam menjalankan proses akuntansi dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Akibat dari pelaksanaan pembukuan sederhana dan belum memiliki sistem akuntansi, maka terlihat bahwa

laporan keuangan yang disajikan belum disajikan dengan tepat dan benar yang kemudian berdampak pada alokasi pembagian bagi hasil yang tidak tepat, hal ini memungkinkan terjadinya kerugian keuangan entitas yaitu badan usaha milik desa (Bumdes) di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2. Penyajian laporan keuangan yang tidak tepat, berdampak pada kinerja dan posisi keuangan entitas. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, laporan keuangan Bumdes disajikan tidak tepat dan akurat hal tersebut berdampak pada penyajian informasi keuangan Bumdes yang tidak tepat. Hal ini dapat diterangkan bahwa informasi keuangan Bumdes tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang meliputi (a) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel, (b) merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (d) berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh organisasi, (e) memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam menjalankan usahanya diharapkan dapat menjalankan sistem akuntansi berdasarkan SAK EMKM, hal tersebut dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, kemudian dapat digunakan untuk melihat dan mengukur tingkat pertumbuhan dan kemajuan dalam sebuah unit usaha BUMDes.
2. Bumdes sebaiknya menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang mudah dan terintegrasi dengan menggunakan program komputersisasi (*software*), penggunaan sistem akuntansi computer tersebut dapat membantu pengurus BUMDes mengetahui pertumbuhan usaha yang dijalankannya, serta penilaian atas resiko dan kapasitas BUMDes dapat terpantau dengan baik jika sistem pelaporan keuangan dapat diselenggarakan secara sistematis. Pengelolaan sistem akuntansi dengan baik, akan menghadirkan inovasi serta tindakan preventif dalam mempertahankan atau menjaga asset BUMDes dan pada kepentingan yang lain, pengurus dapat menghindari sebuah pelaporan keuangan yang tidak akuntabel atau jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- DSA-IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: IAI.
- Haeruddin, & Paweroi, A. (2017). Pengantar Akuntansi Berbasis SAK Umum dan UMKM. Makassar: LPP. Mitra Edukasi.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa. (pp. 41-51). Jember: SNAFER EBIS.
- Mahmud, A., & Susilowati, N. (2019). IBM Pembukuan Akuntansi bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Se Kecamatan Jambu. Jurnal Abdi Mas , 23 (2), 1-5.

- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowa Bunga Gresik. 2 (1), 2614-3968.
- Mariana, L. (2020). Bumdes di Kabupaten Takalar. (Taufik, Interviewer)
- Marlinah, A. (2017). Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 68) Tentang Pengukuran Nilai Wajar Terhadap Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. Astra International, Tbk). *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 298-312.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendes. (2015). Permendes No. 4 Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa).
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Kusuma Yanti, P. M., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada BUMDEs Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 47-59.
- Taufiq. (2019, 07 02). Kinerja Keuangan & BUM Desa Mitra Mandiri Desa Bontokaddopepe. (Haeruddin, Interviewer) Makassar